

## ***Collaborative Governance* Penanggulangan Bencana Banjir Bandang di Desa Nyalindung Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat**

**Heru Mustoko<sup>1</sup> Tati Sarihati<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> Pasca Sarjana Ilmu Pemerintahan Universitas Langlangbuana

<sup>2</sup> Pasca Sarjana Ilmu Pemerintahan Universitas Langlangbuana

Corresponding Author [mustokoheru@gmail.com](mailto:mustokoheru@gmail.com)

DOI: <https://doi.org/10.47431/jirreg.v10i1.763>

### **Article Info**

#### **Article History;**

**Received:**

2026-05-04

**Revised:**

2026-05-21

**Accepted:**

2026-06-15

**Abstract:** *This study aims to analyze the implementation of collaborative governance in flood disaster management in Nyalindung Village, Cipatat District, West Bandung Regency. Using a descriptive qualitative approach, the study finds that collaboration among actors including village government, the Regional Disaster Management Agency (BPBD), community organizations, and local groups has not yet been carried out systematically or sustainably. The existing collaborative practices remain reactive, with community involvement fluctuating and concentrated mainly during emergency response phases. Based on the theoretical framework of Ansell and Gash (2008), the four key elements of collaborative governance, face-to-face dialogue, trust-building, shared understanding, and interdependence have not been optimally fulfilled. The study recommends strengthening local institutional capacity, establishing cross-sectoral coordination forums, and actively involving the community throughout the entire disaster management cycle to build a more resilient, inclusive, and sustainable system.*

**Keywords:** *Collaborative Governance; Natural Disaster; Flood Management*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi *collaborative governance* dalam penanggulangan bencana banjir bandang di Desa Nyalindung, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, studi ini menemukan bahwa kolaborasi antaraktor termasuk pemerintah desa, BPBD, organisasi masyarakat, dan komunitas lokal, penelitian ini belum berjalan secara sistematis dan berkelanjutan. Praktik kolaboratif yang berlangsung masih bersifat reaktif, dengan keterlibatan masyarakat yang fluktuatif dan dominan pada tahap tanggap darurat. Berdasarkan kerangka teori Ansell dan Gash (2008), empat elemen utama *collaborative governance* dialog langsung, pembangunan kepercayaan, pemahaman bersama, dan saling ketergantungan belum terpenuhi secara optimal. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas kelembagaan lokal, pembentukan forum koordinasi lintas sektor, serta pelibatan aktif masyarakat dalam seluruh siklus penanggulangan bencana untuk membangun sistem yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** *Collaborative Governance; Bencana Alam; Banjir*

## **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kerentanan bencana hidrometeorologi, yaitu bencana yang disebabkan karena perubahan iklim dan cuaca (1). Pada dasarnya Bencana alam adalah suatu kejadian atau kerusakan yang disebabkan oleh

alam. Kejadian ini biasanya terjadi secara tiba-tiba atau mendadak dan berpotensi menyebabkan kerugian materi bahkan jiwa manusia. Selain itu, letak geografis Indonesia yang terletak di Cincin Api Pasifik menyebabkan Indonesia rawan terhadap bencana alam (2) hal ini menyebabkan berbagai bencana alam termasuk banjir seringkali terjadi di Indonesia, secara umum banjir merupakan bencana alam yang melanda wilayah yang dialiri oleh sungai dengan jumlah yang cukup banyak (3) secara spesifik banjir dapat membawa kerusakan serta mengganggu jalannya aktivitas ekonomi dan sosial (4) serta sebagai salah satu fenomena alam yang mengancam keberlangsungan hidup manusia adalah bencana alam. Kerugian dapat berupa kerugian material atau nonmaterial (5).

Menurut Balahanti (5) dalam (6) Penyebab banjir juga dapat terjadi dikarenakan daerah yang biasanya kering (bukan lahan basa) tergenang dengan adanya air yang dihasilkan dari curah hujan yang tinggi dan topografi daerah berupa dataran rendah yang cekung, selain itu peristiwa ini juga dapat terjadi karena kapasitas air melebihi debit sistem aliran sungai. Aliran sungai yang melebihi debit akibat hujan yang turun di hulu atau di suatu tempat tertentu terjadi secara terus menerus, sehingga tidak dapat ditampung kembali maka air akan melimpah keluar dan menggenangi daerah sekitarnya.

Dilihat dari data statistik Badan Nasional Penanggulangan Bencana selanjutnya disebut BNPB, Indonesia mengalami 8.333 kejadian banjir sepanjang periode 2014 hingga 2023. Meskipun tren bencana tersebut menunjukkan dinamika yang fluktuatif selama satu dekade terakhir, terdapat kecenderungan peningkatan jumlah kejadian banjir antara tahun 2015 hingga 2020, dengan lonjakan signifikan pasca-2019. Tahun 2020 mencatatkan jumlah tertinggi, yakni 1.531 kejadian banjir. Kendati angka kejadian menurun sejak 2021, dampak kerusakan yang ditimbulkan justru lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Adapun tahun 2023 menjadi periode dengan jumlah kejadian banjir terendah, yaitu sebanyak 351 kasus (7).

Salah satu wilayah yang terdampak dalam tren peningkatan kejadian banjir di Indonesia adalah *Kabupaten Bandung Barat*, yang termasuk dalam kawasan rawan bencana, khususnya di *Kecamatan Cipatat*. Wilayah ini memiliki karakteristik topografi berbukit dan dilalui oleh aliran sungai yang rentan meluap saat musim hujan. Salah satu desa yang paling terdampak adalah *Desa Nyalindung*, yang dalam tiga tahun terakhir mengalami banjir bandang secara berulang.

Bencana banjir bandang di Desa Nyalindung telah menimbulkan dampak signifikan, mulai dari kerusakan fisik pada infrastruktur, kehilangan tempat tinggal, hingga gangguan

terhadap layanan publik. Wilayah ini dikelilingi oleh kawasan hutan dan perbukitan yang rawan longsor serta menjadi jalur aliran air deras saat curah hujan tinggi, sehingga meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi.

Sebagai gambaran faktual mengenai kondisi kebencanaan di lokasi penelitian, berikut adalah data kejadian banjir bandang di Desa Nyalindung selama tiga tahun terakhir.

**Tabel 1.** Data Kejadian Banjir Bandang di Desa Nyalindung Kecamatan Cipatat (2021-2023)

Tahun	Tanggal Kejadian	Luas Wilayah Terdampak	Jumlah Rumah Rusak	Korban Terdampak (KK)	Instansi Terlibat	Bentuk Penanggulangan
2021	18 November 2021	± 12 Ha	35	124	BPBD, TNI, Polri, Pemdes	Evakuasi, logistik darurat, posko pengungsian
2022	4 Desember 2022	± 10 Ha	28	97	BPBD, Tagana, PMI, Karang Taruna	Pembersihan lumpur, bantuan air bersih
2023	7 Maret 2023	± 18 Ha	47	169	BPBD, Dinsos, Relawan, LSM lokal	Dapur umum, distribusi sembako, pendataan kerusakan

Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2023 (8)

Berdasarkan Tabel 1. bencana banjir bandang di Desa Nyalindung menunjukkan pola kejadian yang berulang dan cenderung semakin meluas, dengan dampak yang signifikan terhadap masyarakat. Jumlah rumah rusak dan keluarga terdampak mengalami peningkatan pada tahun 2023, yang mengindikasikan perlunya sistem penanggulangan yang lebih tangguh dan berbasis kolaborasi. Meskipun kolaborasi lintas sektor telah berjalan, pendekatan yang diterapkan masih bersifat reaktif dan belum berkelanjutan, sehingga memperkuat urgensi dilakukannya penelitian mengenai tata kelola kolaboratif dalam penanggulangan bencana.

Penanggulangan bencana pada era saat ini tidak lagi dapat dilakukan secara eksklusif oleh pemerintah semata. Kompleksitas bencana yang semakin meningkat menuntut pendekatan tata kelola yang lebih inklusif dan adaptif. Dalam konteks ini, *collaborative governance* menjadi pendekatan yang relevan dan strategis. Penanggulangan bencana menuntut keterlibatan aktif dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, organisasi kemasyarakatan, sektor swasta, dan lembaga pemerintah lintas sektor, yang bersama-sama membentuk sistem respons yang lebih tangguh dan berkelanjutan.

Menurut Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012), *collaborative governance* merupakan proses dan struktur pengambilan keputusan publik yang melibatkan berbagai aktor lintas

sektor dan institusi yang saling berinteraksi dalam kerangka kerja kolektif untuk mencapai tujuan bersama. Pendekatan ini diyakini mampu meningkatkan efektivitas tata kelola penanggulangan bencana melalui sinergi antaraktor, pemanfaatan sumber daya bersama, dan penguatan kepercayaan public (9).

Konsep ini sebelumnya telah dikembangkan oleh Ansell dan Gash (2008), yang menekankan pentingnya partisipasi semua pemangku kepentingan baik pemerintah, masyarakat, sektor swasta, maupun organisasi non-pemerintah dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program secara bersama-sama. Mereka menyoroti bahwa keberhasilan kolaborasi sangat bergantung pada kondisi awal, desain institusional, kepemimpinan fasilitatif, dan pembangunan kepercayaan antaraktor (10).

Dalam hal ini penelitian ini menjadi krusial untuk memahami dinamika hubungan antar aktor lokal, sejauh mana kolaborasi tersebut mampu mengurangi risiko bencana, serta bagaimana desain kebijakan dan kelembagaan lokal mendukung atau menghambat praktik *collaborative governance* dalam penanggulangan bencana.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan kontekstual terhadap fenomena yang diteliti. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan secara akurat kondisi objektif di lapangan tanpa manipulasi atau intervensi dari peneliti, sebagaimana dijelaskan oleh Moleong (11) bahwa penelitian kualitatif bersifat naturalistik dan menempatkan peneliti sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan data.

Data yang dikumpulkan bukan berupa angka, melainkan informasi tekstual yang diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dokumentasi, dan catatan lapangan. Menurut Creswell (12), pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menangkap makna, persepsi, dan dinamika sosial yang tidak dapat dijelaskan secara kuantitatif. Penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis, melainkan untuk mengeksplorasi dan memahami variabel secara independen berdasarkan konteks aktual.

Sebagaimana dijelaskan oleh Nazir M (13), metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan fenomena secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Dengan demikian, pendekatan ini memberikan gambaran komprehensif terhadap efektivitas implementasi prinsip Agile Governance dalam pelayanan publik. Sedangkan menurut Sugiyono (14) menekankan bahwa metode ini cocok digunakan dalam

penelitian sosial yang bertujuan untuk memahami perilaku, interaksi, dan struktur sosial secara mendalam. Bersamaan dengan itu Denzin NK LY (15) penelitian kualitatif adalah pendekatan interpretatif dan naturalistik yang bertujuan memahami makna suatu fenomena dalam konteks alaminya. Peneliti berusaha menafsirkan dunia berdasarkan perspektif subjek yang diteliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanggulangan bencana banjir bandang di Desa Nyalindung belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip *collaborative governance* yang ideal. Meskipun terdapat upaya kolaboratif antara pemerintah desa, BPBD, dan masyarakat, pelaksanaannya masih bersifat reaktif dan belum terstruktur secara berkelanjutan, sifat reaktif tersebut terlihat dari penanganan yang lebih berfokus pada respon setelah bencana terjadi, seperti evakuasi dan penyaluran bantuan darurat, sementara upaya mitigasi dan kesiapsiagaan sebelum bencana masih terbatas. Selain itu, koordinasi antar pemangku kepentingan cenderung bersifat insidental dan belum didukung oleh mekanisme kolaborasi yang terencana dan berkelanjutan dalam seluruh tahapan manajemen bencana. Temuan ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 (16) tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 (17) tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020–2044, yang menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam manajemen risiko bencana.

Di tingkat lokal, tantangan utama yang teridentifikasi meliputi hambatan komunikasi antaraktor, rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan mitigasi, serta ketimpangan kapasitas kelembagaan, ketimpangan ini terlihat dari perbedaan kapasitas antar lembaga dalam hal sumber daya manusia, dukungan anggaran, akses informasi kebencanaan, serta kemampuan teknis dalam perencanaan dan pelaksanaan mitigasi bencana.. Fragmentasi koordinasi antar lembaga dan keterbatasan sumber daya turut memperlemah upaya membangun sistem penanggulangan yang bersifat preventif dan berkelanjutan. Kondisi ini memperkuat temuan Emerson, Nabatchi, dan Balogh (9), serta Triyanti dan Nugroho (18), yang menekankan pentingnya sinergi, kepercayaan, dan kesetaraan kapasitas sebagai fondasi keberhasilan tata kelola kolaboratif.

**Tabel 2. Kapasitas Kelembagaan Penanggulangan Bencana di Desa Nyalindung (2024)**

No	Lembaga/Unit Terkait	Bentuk Keterlibatan	Ketersediaan Sumber Daya	Koordinasi Antar Lembaga	Catatan
1	Pemerintah Desa (Pemdes)	Koordinasi awal & pengumpulan data	Terbatas (SDM & anggaran)	Rendah–Sedang	Perlu peningkatan pelatihan
2	BPBD Kab. Bandung Barat	Respon darurat, distribusi logistik	Memadai	Sedang–Tinggi	Bergantung laporan desa
3	Karang Taruna	Evakuasi & dapur umum	Cukup	Rendah	Tidak rutin dilibatkan
4	Posyandu & PKK	Distribusi makanan bayi dan lansia	Terbatas	Rendah	Partisipatif saat darurat
5	LSM/Komunitas Lingkungan	Edukasi, rehabilitasi lahan pasca-bencana	Terbatas	Sedang	Tidak terstruktur
6	Relawan Lokal/Tagana	Evakuasi, pertolongan pertama	Terbatas (peralatan)	Tinggi dengan BPBD	Tidak selalu aktif

Sumber: Hasil Dokumentasi Wawancara KBB, 2024.

Berdasarkan Tabel 2, kapasitas kelembagaan di Desa Nyalindung masih belum optimal. Sebagian besar lembaga lokal seperti pemerintah desa, Karang Taruna, Posyandu, PKK, dan relawan hanya aktif dalam tahap tanggap darurat, dengan keterlibatan yang belum terstruktur dan sumber daya yang terbatas. Pemerintah desa sebagai aktor utama menghadapi kendala serius dalam hal anggaran, sumber daya manusia, dan peralatan, sementara BPBD Kabupaten Bandung Barat hadir dalam situasi darurat namun masih bersifat top-down dan bergantung pada laporan dari desa.

Kesenjangan koordinasi dan keterlibatan antaraktor menunjukkan belum terbentuknya sistem kolaborasi yang permanen. Hal ini bertentangan dengan prinsip *collaborative governance* sebagaimana dirumuskan oleh Emerson et al. (2012) (9), yang menekankan pentingnya *principled engagement*, *shared motivation*, dan *capacity for joint action*. Dalam konteks Desa Nyalindung, ketiga dimensi tersebut belum terpenuhi secara sistematis, sehingga kolaborasi yang terjadi cenderung insidental dan tidak berkelanjutan.

**Tabel 3. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Penanggulangan Bencana (2023)**

Jenis Kegiatan	Jumlah Kegiatan (per tahun)	Partisipasi Warga (%)	Keterangan
Sosialisasi mitigasi bencana	3 kegiatan	± 40%	Kurang diminati, hanya warga terdampak yang hadir
Gotong royong membersihkan sungai	5 kegiatan	± 60%	Aktif saat pasca-bencana, tapi tidak rutin
Pelatihan evakuasi dan simulasi bencana	2 kegiatan	± 25%	Mayoritas peserta dari perangkat desa dan pemuda
Musyawarah desa terkait bencana	4 forum	± 50%	Kurang partisipasi perempuan dan lansia
Program rehabilitasi lingkungan	3 kegiatan	± 30%	Kesulitan menjaga keberlanjutan

Sumber: Data Partisipasi dari Pemerintah Desa Nyalindung dan BPBD KBB, 2023. (19)

Tabel 3. turut memperlihatkan bahwa partisipasi masyarakat dalam kegiatan penanggulangan bencana masih bersifat fluktuatif dan dominan pada tahap respons atau pasca-bencana. Kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan seperti pelatihan evakuasi, sosialisasi, dan rehabilitasi lingkungan kurang diminati, dengan tingkat partisipasi yang relatif rendah. Musyawarah desa pun belum sepenuhnya inklusif, dengan minimnya keterlibatan kelompok rentan seperti perempuan dan lansia. Rendahnya partisipasi ini mencerminkan lemahnya ikatan sosial dan belum terbangunnya kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah desa, yang menurut Ansell dan Gash (10) merupakan elemen kunci dalam keberhasilan *collaborative governance: face-to-face dialogue, trust-building, shared understanding, dan interdependence*.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa mekanisme *collaborative governance* dalam penanggulangan bencana banjir bandang di Desa Nyalindung masih menghadapi tantangan struktural dan sosial. Diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan lokal, penciptaan ruang deliberatif, serta desain kolaborasi yang inklusif dan adaptif terhadap dinamika komunitas. Integrasi antara aktor formal dan non-formal menjadi krusial untuk membangun sistem penanggulangan bencana yang tidak hanya responsif, tetapi juga preventif dan berkelanjutan.

## **Pembahasan**

Pembahasan ini mengkaji praktik penanggulangan bencana banjir bandang di Desa Nyalindung melalui pendekatan *Collaborative Governance* sebagaimana dirumuskan oleh Ansell dan Gash (20). Teori ini menawarkan kerangka analitis yang menekankan pentingnya keterlibatan berbagai aktor dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan secara kolektif. Dengan mengacu pada empat elemen utama *face-to-face dialogue, trust building, shared understanding, dan interdependence*, pembahasan ini bertujuan untuk menilai sejauh mana prinsip-prinsip kolaboratif telah diterapkan dalam konteks lokal, berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat, pengamat lingkungan, BPBD, dan Karang Taruna. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi tantangan dan peluang dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

### **1. Face to Face Dialogue**

Di Desa Nyalindung, dialog langsung antaraktor seperti pemerintah desa, BPBD, Karang Taruna, dan masyarakat belum berjalan secara sistematis dan berkesinambungan. Meskipun musyawarah desa terkait kebencanaan sesekali

dilaksanakan, pelibatan aktor lokal masih bersifat selektif dan belum mencakup seluruh elemen masyarakat. Partisipasi kelompok rentan seperti perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas cenderung rendah, baik dalam forum perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan mitigasi. Hal ini menunjukkan bahwa ruang deliberatif yang tersedia belum dirancang secara inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan sosial yang beragam. Akibatnya, proses pengambilan keputusan dalam penanggulangan bencana belum sepenuhnya mencerminkan prinsip partisipatif yang menjadi inti dari pendekatan *collaborative governance*. Ketiadaan mekanisme formal untuk menjamin keterlibatan lintas kelompok turut memperlemah legitimasi dan efektivitas kebijakan lokal dalam menghadapi risiko banjir bandang yang berulang.

## **2. *Trust Building***

Kepercayaan antaraktor dalam penanggulangan bencana di Desa Nyalindung belum terbentuk secara menyeluruh dan berkelanjutan. Pemerintah desa masih berperan sebagai aktor dominan dalam proses pengambilan keputusan, sementara masyarakat cenderung menunjukkan keterlibatan yang sporadis, terutama pada fase tanggap darurat. Ketergantungan yang tinggi terhadap BPBD Kabupaten Bandung Barat dalam situasi krisis mencerminkan belum optimalnya kepercayaan terhadap kapasitas kelembagaan lokal untuk menangani bencana secara mandiri.

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan mitigasi seperti pelatihan evakuasi, simulasi bencana, dan rehabilitasi lingkungan menjadi indikator lemahnya ikatan sosial dan belum terbangunnya kepercayaan kolektif. Ketidakterlibatan aktor komunitas dalam tahap perencanaan dan koordinasi awal turut menciptakan kesenjangan persepsi serta minimnya rasa kepemilikan terhadap program penanggulangan bencana. Hal ini berdampak pada terbatasnya dukungan sosial dan rendahnya efektivitas implementasi kebijakan di tingkat lokal.

Menurut teori *Collaborative Governance* dari Ansell dan Gash (2008), pembangunan kepercayaan merupakan proses jangka panjang yang menuntut keterbukaan, konsistensi, dan pengakuan terhadap kontribusi semua pihak. Dalam konteks Desa Nyalindung, belum adanya mekanisme formal yang dirancang untuk membangun dan memelihara kepercayaan antaraktor menyebabkan kolaborasi yang terjadi cenderung bersifat reaktif dan tidak berkelanjutan. Oleh karena itu, strategi komunikasi yang lebih terbuka, pelibatan aktif masyarakat sejak tahap perencanaan, serta penguatan kapasitas kelembagaan lokal menjadi langkah krusial untuk

menumbuhkan kepercayaan kolektif dan mendukung efektivitas tata kelola penanggulangan bencana yang inklusif dan berdaya tahan.

### **3. *Shared Understanding***

Pemahaman bersama mengenai risiko bencana dan peran masing-masing aktor dalam penanggulangan banjir bandang di Desa Nyalindung belum terbangun secara menyeluruh dan sistematis. Berdasarkan Tabel 2, keterlibatan lembaga-lembaga lokal seperti Posyandu, PKK, dan LSM lingkungan masih bersifat insidental dan terbatas pada fase tanggap darurat. Keterlibatan ini belum terintegrasi dalam sistem kelembagaan yang berkelanjutan, sehingga kontribusi mereka belum menjadi bagian dari strategi penanggulangan bencana yang holistik.

Ketiadaan mekanisme formal yang mengatur distribusi peran, tanggung jawab, dan kontribusi antaraktor dalam keseluruhan siklus penanggulangan bencana mulai dari mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga pemulihan menghambat terbentuknya visi bersama dalam membangun ketangguhan desa. Ketidakterpaduan ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih peran, lemahnya koordinasi, serta rendahnya efektivitas program mitigasi yang seharusnya menjadi prioritas dalam menghadapi bencana yang berulang.

Menurut kerangka *Collaborative Governance* dari Ansell dan Gash (2008), *shared understanding* merupakan prasyarat penting dalam membangun sinergi dan komitmen kolektif. Tanpa adanya pemahaman bersama, setiap aktor cenderung bekerja secara terpisah, dengan orientasi jangka pendek dan responsif, bukan preventif. Hal ini berisiko menciptakan fragmentasi dalam pelaksanaan program dan melemahkan kapasitas kolektif dalam menghadapi risiko bencana secara berkelanjutan.

Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis untuk membangun pemahaman bersama melalui forum lintas sektor yang inklusif, pelatihan terpadu lintas lembaga, serta penyusunan rencana kontinjensi desa yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya akan memperkuat koordinasi dan efektivitas program, tetapi juga mendorong terbentuknya kesepahaman dan rasa tanggung jawab bersama dalam membangun ketangguhan desa terhadap bencana.

### **4. *Interdependence***

Meskipun telah terbentuk ketergantungan fungsional antaraktor dalam penanggulangan bencana banjir bandang di Desa Nyalindung seperti antara relawan lokal dan BPBD dalam proses evakuasi dan distribusi logistic hubungan tersebut belum berkembang menjadi bentuk

interdependensi strategis yang berkelanjutan. Kolaborasi yang terjadi masih bersifat top-down, dengan dominasi inisiatif dan pengambilan keputusan oleh lembaga formal seperti BPBD, sementara aktor lokal seperti Karang Taruna, Posyandu, dan komunitas lingkungan hanya dilibatkan secara situasional dan tidak dalam kerangka kerja yang terstruktur.

Ketiadaan mekanisme formal yang mengatur peran, tanggung jawab, dan alur koordinasi antaraktor menyebabkan sinergi belum optimal. Lembaga masyarakat yang memiliki potensi besar dalam mendukung kegiatan mitigasi dan pemulihan belum sepenuhnya diintegrasikan ke dalam sistem kelembagaan desa. Hal ini berdampak pada lemahnya kesinambungan kolaborasi, yang hanya aktif pada saat krisis dan tidak berlanjut dalam fase kesiapsiagaan atau pemulihan.

Menurut Ansell dan Gash (2008), interdependensi yang sehat dalam *collaborative governance* menuntut adanya pengakuan terhadap kontribusi masing-masing aktor, pembagian peran yang adil, serta keberadaan mekanisme koordinasi yang memungkinkan kerja sama berlangsung secara horizontal, bukan hanya vertikal. Dalam konteks ini, hubungan antaraktor seharusnya tidak hanya didasarkan pada kebutuhan sesaat, tetapi dibangun atas dasar kesalingtergantungan yang mendorong komitmen jangka panjang dan pembelajaran bersama.

Untuk mewujudkan interdependensi yang strategis, diperlukan langkah-langkah penguatan kelembagaan seperti penyusunan protokol kolaborasi desa, pembentukan forum koordinasi lintas sektor, serta pelatihan terpadu yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Dengan demikian, kolaborasi dapat menjadi bagian integral dari sistem kesiapsiagaan dan ketangguhan desa, bukan sekadar respons terhadap krisis, melainkan sebagai strategi berkelanjutan dalam menghadapi risiko bencana secara kolektif dan terorganisir.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi *collaborative governance* dalam penanggulangan bencana banjir bandang di Desa Nyalindung belum berjalan secara optimal. Meskipun terdapat upaya kolaboratif antara pemerintah desa, BPBD, organisasi masyarakat, dan komunitas lokal, pelaksanaannya masih bersifat reaktif, tidak terstruktur, dan belum berkelanjutan. Empat elemen utama dalam kerangka Ansell dan Gash, *face-to-face dialogue*, *trust-building*, *shared understanding*, dan *interdependence* belum terpenuhi secara sistematis, sehingga kolaborasi yang terjadi cenderung insidental dan kurang mendukung ketangguhan desa secara menyeluruh.

Keterbatasan kapasitas kelembagaan, rendahnya partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan dan mitigasi, serta belum adanya mekanisme koordinasi lintas sektor yang formal menjadi tantangan utama dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang inklusif dan adaptif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan struktur kelembagaan lokal,

penciptaan ruang deliberatif yang menjamin keterlibatan semua aktor, serta integrasi peran komunitas dalam seluruh siklus penanggulangan bencana. Dengan pendekatan kolaboratif yang berbasis kesepahaman dan saling ketergantungan, Desa Nyalindung memiliki potensi untuk membangun tata kelola bencana yang lebih tangguh, responsif, dan berkelanjutan.

## REFERENCE

1. Isnaini R, Surabaya UA. Analisis Bencana Tanah Longsor di Wilayah Jawa Tengah. 2019;1(2):143–60.
2. Basuki I. Kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana banjir di Pancasari Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng. *J Pendidik Geogr Undiksha*. 2019;
3. Madani, I., Bachri, S., & Aldiansyah S. Pemetaan Kerawanan Banjir di Daerah Aliran Sungai (DAS) Bendo Kabupaten Banyuwangi Berbasis Sistem Informasi Geografis. *J Geosaintek*. 2022;
4. Faiza, I. M., Gunawan, G., & Andriani W. Tinjauan Pustaka Sistematis: Penerapan Metode Machine Learning untuk Deteksi Bencana Banjir. *J Minfo Polgan [Internet]*. 2022; Available from: <https://doi.org/10.33395/jmp.v11i2.11657>
5. Arvi MD, Sahanaya R, Sibarani Y, Tanjung YI. Analisis Faktor Penyebab Bencana Banjir di Kota-Kota Besar Indonesia : Studi Kasus Analisis Banjir Berbasis Literasi Pendahuluan. 2025;3(1):1–8.
6. Balahanti, M., Arvi, M. D., Sibarani, R. S. Y., Tanjung, Y. I., & Fairuz T. Analisis faktor penyebab bencana banjir di kota-kota besar Indonesia: Studi kasus analisis banjir berbasis literasi. *Indones J Emerg Trends Community Empower*. 2023;
7. Bencana BNP. *uku Data Bencana Indonesia 2023 [Internet]*. 2024. Available from: [https://bnpb.go.id/storage/app/media/Buletin Info Bencana/Buku Data Bencana/Buku Data Bencana Indonesia 2023\\_compressed.pdf](https://bnpb.go.id/storage/app/media/Buletin%20Info%20Bencana/Buku%20Data%20Bencana%20Indonesia%202023_compressed.pdf)
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Barat. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. 2023. Laporan Tahunan BPBD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021–2023.
9. Emerson K, Nabatchi T, Balogh S. An Integrative Framework for Collaborative Governance [Internet]. Vol. 22(1). *Journal of Public Administration Research and Theory*; [cited 2025 Apr 18]. 1–29 p. Available from: <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
10. Ansell C, Gash A. Collaborative governance in theory and practice. *Adm Res Theory*. 2007;18(4):543–71.
11. Moleong Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.; 2017.
12. John W. Creswell. *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed.)*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications; 2014.
13. Nazir M. *Metode penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.; 2013.
14. Sugiyono. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta; 2019.
15. Denzin NK LY. *Handbook of Qualitative Research*. Terjemahan Dariyatno dkk.

Yogyakarta: Pustaka Pelajar; 2009.

16. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007.
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020.
18. Nugroho H. Collaborative governance dalam penanggulangan bencana: Studi kasus banjir di Indonesia. *J Wacana Publik*. 2021;
19. Pemerintah Desa Nyalindung & BPBD Kabupaten Bandung Barat. Laporan partisipasi masyarakat dalam kegiatan penanggulangan bencana banjir bandang Desa Nyalindung tahun 2023. 2023.
20. Ansell C, Gash A. Collaborative governance in theory and practice. *Public Adm Res Theory*. 18(4):543–71.